



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA  
CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI  
DANA DESATAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocussing kegiatan, Realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 305);
14. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 09);
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 33).
16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PMD	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 18 OKTOBER 2021

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR. . .

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
 NOMOR 41 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT PERUBAHAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Desa	Pagu ADD Sebelum Perubahan	Pagu ADD Setelah Perubahan	(Bertambah/Berkurang)
1	2	3	4	5	6
1	Bangkala	Pallantikang	Rp 907.894.290	Rp 883.394.292	Rp 24.499.998
		Kalimporo	Rp 837.995.550	Rp 815.381.806	Rp 22.613.744
		Punagaya	Rp 844.606.410	Rp 821.814.268	Rp 22.792.142
		Mallasaoro	Rp 908.743.200	Rp 884.220.294	Rp 24.522.906
		Kapita	Rp 1.029.196.610	Rp 1.001.423.206	Rp 27.773.404
		Marayoka	Rp 867.515.190	Rp 844.104.843	Rp 23.410.347
		Jenetallasa	Rp 823.019.460	Rp 800.809.853	Rp 22.209.607
		Tombo-Tombolo	Rp 750.040.940	Rp 729.800.697	Rp 20.240.243
		Gunung Silanu	Rp 859.124.410	Rp 835.940.493	Rp 23.183.917
		Bontomanai	Rp 754.244.060	Rp 733.890.393	Rp 20.353.667
2	Tamalatea	Borongtala	Rp 864.067.420	Rp 840.750.113	Rp 23.317.307
		Bontosunggu	Rp 831.952.950	Rp 809.502.269	Rp 22.450.681
		Turatea	Rp 747.548.980	Rp 727.375.983	Rp 20.172.997
		Karelayu	Rp 725.011.670	Rp 705.446.854	Rp 19.564.816
		Bontojai	Rp 733.015.590	Rp 713.234.784	Rp 19.780.806



8	Turatea	Paitana	Rp	837.101.400	Rp	814.511.785	Rp	22.589.615
		Bontomate'ne	Rp	807.421.660	Rp	785.632.968	Rp	21.788.692
		Mangepong	Rp	777.885.590	Rp	756.893.944	Rp	20.991.646
		Bululoe	Rp	892.264.630	Rp	868.186.407	Rp	24.078.223
		Kayuloe Barat	Rp	763.349.050	Rp	742.749.680	Rp	20.599.370
		Langkura	Rp	752.525.910	Rp	732.218.608	Rp	20.307.302
		Bungungloe	Rp	788.874.800	Rp	767.586.605	Rp	21.288.195
		Kayuloe Timur	Rp	665.029.080	Rp	647.082.926	Rp	17.946.154
		Jombe	Rp	718.840.600	Rp	699.442.314	Rp	19.398.286
		Tanjonga	Rp	744.250.610	Rp	724.166.622	Rp	20.083.988
9	Arungkeke	Parasangan Beru	Rp	676.726.690	Rp	658.464.870	Rp	18.261.820
		Bulo-Bulo	Rp	738.132.820	Rp	718.213.923	Rp	19.918.897
		Arungkeke	Rp	821.555.470	Rp	799.385.370	Rp	22.170.100
		Palajau	Rp	785.173.510	Rp	763.985.196	Rp	21.188.314
		Boronglamu	Rp	724.326.710	Rp	704.780.378	Rp	19.546.332
		Arungkeke Pallantikang	Rp	715.533.290	Rp	696.224.253	Rp	19.309.037
		Kalumpangloe	Rp	730.442.130	Rp	710.730.771	Rp	19.711.359
		Kampala	Rp	733.063.290	Rp	713.281.197	Rp	19.782.093
		Rumbia	Rp	778.909.510	Rp	757.890.233	Rp	21.019.277
		Lebangmanai	Rp	750.131.790	Rp	729.889.095	Rp	20.242.695
10	Rumbia	Bontomanai	Rp	751.553.980	Rp	731.272.906	Rp	20.281.074
		Bontotiro	Rp	707.551.720	Rp	688.458.070	Rp	19.093.650
		Loka	Rp	716.567.280	Rp	697.230.341	Rp	19.336.939
		Tompopulu	Rp	715.359.040	Rp	696.054.706	Rp	19.304.334
		Kassi	Rp	777.326.670	Rp	756.350.107	Rp	20.976.563
		Pallantikang	Rp	731.829.980	Rp	712.081.169	Rp	19.748.811
		Lebangmanai Utara	Rp	696.600.940	Rp	677.802.803	Rp	18.798.137
		Bontocini	Rp	669.098.250	Rp	651.042.287	Rp	18.055.963
		Jenetallasa	Rp	730.718.710	Rp	710.999.887	Rp	19.718.823
		Ujung Butu	Rp	746.010.210	Rp	725.878.738	Rp	20.131.472

11	Tarowang	Pao	Rp	779.156.020	Rp	758.130.091	Rp	21.025.929
		Bontorappo	Rp	727.320.500	Rp	707.693.379	Rp	19.627.121
		Tarowang	Rp	739.103.580	Rp	719.158.487	Rp	19.945.093
		Allu Tarowang	Rp	786.545.650	Rp	765.320.308	Rp	21.225.342
		Balang Baru	Rp	786.079.030	Rp	764.866.280	Rp	21.212.750
		Balangloe Tarowang	Rp	712.088.930	Rp	692.872.841	Rp	19.216.089
		Bonto Ujung	Rp	821.083.460	Rp	798.926.097	Rp	22.157.363
		Tino	Rp	822.504.760	Rp	800.309.043	Rp	22.195.717
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>64.002.844.900</b>	<b>Rp</b>	<b>62.275.694.963</b>	<b>Rp</b>	<b>1.727.149.937</b>

KOORDINASI / VERIFIKASI  
 SEKRETARIS DESA  
 ASISTEN  
**KAODIS PMD**  
 MENDIRI  
 KEMENTERIAN PER. UJ & DOK. HUKUM

BUPATI JENEPONTO,  
 IKHSAN ISKANDAR